

Implementasi Green Movement sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Shinta Hartini Putri^{1*}, Seni Satria Mukti Nur Sakinah², Nisa Lathifah³

¹Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Jawa Barat

²Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Jawa Barat

³Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Jawa Barat

e-mail: shintahartiniputri@unibi.ac.id

Abstrak. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Program CSR juga dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang dinamakan Gerakan Jumat Menanam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses tahapan dan penerapan prinsip Corporate Social Responsibility, serta untuk mengetahui alasan mengapa Gerakan Jumat Menanam menjadi program rutin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Perolehan data penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa Gerakan Jumat Menanam menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat mengenai implementasi GTTP di lahan kritis Jawa Barat, melakukan rapat internal untuk meninjau lahan kritis, dan melakukan survei untuk menentukan bibit yang akan ditanam. Tahap implementasi meliputi pembentukan sebuah tim dan pengarahan terkait perawatan pohon. Tahap evaluasi dilakukan pada akhir tahun untuk melihat perkembangan bibit yang ditanam. Tahap pelaporan dilakukan melalui website Si Mantri Bibit dan Si Mantap. Adapun alasan Gerakan Jumat Menanam menjadi program rutin adalah karena kondisi lahan kritis di Jawa Barat mencapai 907.683,67 hektare, sehingga memerlukan penanganan yang konsisten.

Kata Kunci: Green Movement; CSR; Penanaman; Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Pendahuluan

Saat ini, banyak perusahaan yang menjalankan kegiatan dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menunjukkan tanggung jawab mereka kepada masyarakat dan pemangku kepentingannya (Sattayapanich et al., 2022). Kegiatan CSR juga memiliki kemampuan untuk memuaskan tuntutan dan harapan pemangku kepentingan (Hamid et al., 2014). Gerakan Jumat Menanam merupakan rebranding dari gerakan sebelumnya, yaitu “Tanaman Pelihara Pohon” yang bertujuan untuk pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis. Hal ini menjadi keunikan, karena kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemulihan daerah aliran sungai di Jawa Barat yang kemudian menjadi agenda mingguan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, jika dibandingkan dengan Dinas Kehutanan Provinsi lain yang belum melaksanakan kegiatan mingguan dengan cara menanam pohon dalam program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dari sisi geografis, Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi strategis karena letaknya yang langsung berbatasan dengan Ibukota Negara. Dari sisi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), di mana hulu sungai besar yang bermuara di Provinsi lain juga berada di wilayah Provinsi Jawa Barat (Wahyuningrum & Basuki, 2019). Dengan melihat kondisi tersebut, keberadaan dan kelestarian hutan di Provinsi Jawa Barat mutlak perlu dipertahankan (Retno, 2021).

Di samping itu, hal yang menjadi urgensi saat ini adalah pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam (Sirait et al., 2021). Lahan kritis terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam melebihi kapasitas produksinya tanpa diimbangi dengan rehabilitasi lahan (Pertwi, 2021). Ruang terbuka hijau ataupun situ-situ yang seharusnya berfungsi menampung air hujan di Jawa Barat kini menjadi kawasan pembangunan, yang merupakan fenomena yang sering terjadi (Pamungkas & Karmadi, 2015). Akibatnya, banyak sumber daya lahan yang menjadi lahan kritis, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Sebagai upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis, Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran No. 522.4/17/Rek tanggal 17 Februari 2020 tentang Pelaksanaan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon di Lahan Kritis Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis serta untuk mewujudkan Pemulihan Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat (Si Mantri Bibit, 2020). Hal tersebut yang mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan Green Movement melalui Gerakan Jumat Menanam pada awal tahun 2022.

Green Movement sendiri merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi melalui gerakan penghijauan dan mencari solusi atas masalah lingkungan di seluruh dunia. Fenomena Green Movement berkembang dari berbagai lapisan masyarakat. Para pemangku kepentingan telah menyadari perlunya perubahan serius untuk menjaga lingkungan (Kubba, n.d.), termasuk yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Green Movement melalui Gerakan Jumat Menanam merupakan program CSR yang dilaksanakan oleh Divisi Hubungan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemangku kepentingan tetapi juga kepada lingkungan. Divisi tersebut memiliki tugas untuk mensosialisasikan program yang akan dan telah dilaksanakan, serta secara fungsional divisi ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan CSR.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat juga turut merealisasikan beberapa nilai penguatan fokus pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yaitu nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Selain melestarikan hutan, Dinas Kehutanan juga turut membangun generasi muda melalui program Gerakan Jumat Menanam. Hal ini menarik karena menurut hasil pra-penelitian, menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, pada dasarnya para generasi muda saat ini tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar. Program Gerakan Jumat Menanam ini diharapkan dapat mengaplikasikan Gerakan Green Movement dengan mengedukasi generasi muda untuk mencintai lingkungan mereka.

Hal ini sesuai dengan visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu "Hutan Lestari Bagi Kesejahteraan Masyarakat." Adapun hasil dari kegiatan Gerakan Jumat Menanam, selain memberikan edukasi kepada masyarakat, juga mengurangi lahan kritis di Jawa Barat. Green Movement yang diintegrasikan dalam program CSR berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi bagaimana program CSR ini dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Implementasi CSR dalam Green Movement juga dapat memperkuat reputasi dan citra positif Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal internasional ataupun jurnal nasional terakreditasi yang menjelaskan permasalahan mengenai upaya pengendalian kerusakan lingkungan melalui kegiatan CSR. Penelitian terdahulu terkait dengan Green Movement mayoritas dilakukan dengan kajian deskriptif dan menggunakan metode pemecahan masalah yang terjadi. Green Movement sebagai kegiatan CSR tidak dijelaskan secara mendalam pada hasil dan evaluasi, sehingga penelitian terdahulu tersebut masih dapat dikembangkan. Pengembangan implementasi Green Movement melalui CSR yang dikhususkan pada kegiatan kedinasan menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian ini, karena kegiatan Green Movement ataupun CSR pada penelitian lain belum secara spesifik menjelaskan dampak yang terjadi. Selain itu, populasi dari penelitian terdahulu lebih menekankan pada masyarakat ataupun mitra dari kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk dapat mengeksplorasi kegiatan Green Movement melalui CSR, khususnya di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Dengan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Green Movement sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat." Untuk memperjelas fokus penelitian, peneliti mengidentifikasi pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Green Movement melalui tahapan CSR dalam pelaksanaan Gerakan Jumat Menanam di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat? (2) Mengapa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat memilih Gerakan Jumat Menanam sebagai kegiatan rutin mingguan?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan studi kasus, peneliti dapat berinteraksi terus-menerus dengan isu-isu teoritis yang dikaji dan dengan data-data yang dikumpulkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber bukti terkait peristiwa yang berkonteks kehidupan nyata (Nugharani, 2014).

Adapun teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan secara primer, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik keabsahan yang digunakan adalah triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa triangulasi data didefinisikan sebagai pembuktian data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara dan waktu yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam situasi yang berbeda. Peneliti membandingkan data untuk memverifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan dan berdasarkan data sekunder dari studi literatur. Pengecekan kembali melalui triangulasi sumber dan waktu dilakukan dengan mengambil

data dari hasil FGD bersama Divisi Hubungan Masyarakat dan kelompok mitra CSR mengenai aktivitas Green Movement melalui Gerakan Jumat Menanam. Metode penelitian dan tahap penelitian kualitatif ini akan dijelaskan lebih rinci melalui diagram alir penelitian berikut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih hal-hal yang pokok dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di instansi maupun di lapangan tempat diimplementasikannya Program CSR Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kemudian, peneliti mengumpulkan data untuk melengkapi serta memperkuat data yang diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dianalisis. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti hasil wawancara dan observasi yang menjadi dasar kesimpulan yang kuat.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan mengecek hasil pengamatan dari wawancara dengan narasumber, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan pribadi, serta membandingkan dengan dokumen yang ada. Pengecekan juga dilakukan kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan Program Gerakan Jumat Menanam dengan membandingkan hasil yang diamati dengan pandangan narasumber. Metode penelitian merupakan prosedur atau tahapan dan teknik penelitian. Antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, prosedur dan tekniknya akan berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Tahapan CSR menurut Wibisono terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan (Halimah Mufrodatul, 2016: 4). Dalam tahap perencanaan, Gerakan Jumat Menanam ini dilaksanakan sejak tahun 2022, tepatnya pada bulan Februari. Tahap pertama dalam implementasi adalah perencanaan mengenai program Gerakan Jumat Menanam. Berikut hasil wawancara dengan Konseptor Gerakan Jumat Menanam, yang mengatakan:

“Kondisi lahan kritis yang saat ini di Jawa Barat itu ada 829.556 hektare yang harus ditanggulangi. Nah, filosofi itu kemudian ada himbauan Pak Gubernur melalui surat edaran GTPP, dan ada Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon. Dulu estimasinya 50 juta pohon yang ditargetkan kami dinas itu.” (Wawancara dengan Nana Subarna, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, program Gerakan Jumat Menanam ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sejak Gubernur Jawa Barat memberikan Surat Edaran No. 522.4/17/Rek tanggal 17 Februari 2020 tentang Pelaksanaan Gerakan Tanam Pelihara Pohon (GTPP) di Lahan Kritis Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Surat edaran ini bertujuan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PEDAS), serta untuk mewujudkan rehabilitasi lahan kritis, mitigasi bencana akibat perubahan iklim, dan perbaikan lingkungan. Dalam surat tersebut, Bapak Ridwan

Kamil selaku Gubernur Jawa Barat saat itu menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk terlibat dalam menyelesaikan program Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTTP). Target yang diberikan oleh Bapak Ridwan Kamil adalah menanam 50 juta pohon dengan estimasi waktu selama dua tahun. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat berhasil menanam 52.323.425 bibit, melebihi target yang diberikan, sehingga program Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon ini dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat kembali meluncurkan program penanaman yang disebut Gerakan Jumat Menanam.

Awareness building yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam Gerakan Jumat Menanam ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk menangani lahan-lahan kritis di Provinsi Jawa Barat. Program Gerakan Jumat Menanam ini selaras dengan visi dan tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yaitu "Hutan Lestari Bagi Kesejahteraan Masyarakat". Maksud dari visi tersebut adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat memiliki target untuk mengatasi lahan-lahan kritis demi kesejahteraan masyarakat. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah memiliki peta terkait lahan-lahan kritis di Provinsi Jawa Barat, yang menjadi prioritas utama untuk penanganannya.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan penanaman di pinggiran sungai dan pantai yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Gerakan Jumat Menanam. Karena lokasi-lokasi tersebut rawan terjadinya bencana alam, hal ini termasuk dalam CSR assessment. Untuk mengatasi lahan-lahan kritis tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tentu memerlukan bantuan dari seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan CSR merupakan komitmen perusahaan untuk dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada keseimbangan perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kapitan et al., n.d.). Beberapa pihak yang telah dilibatkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi persentase tutupan lahan melalui program Gerakan Jumat Menanam adalah sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Barat. Kriteria sekolah yang dilibatkan dalam Gerakan Jumat Menanam ini adalah sekolah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, berada di dekat lokasi penanaman, serta sesuai dengan program sekolah.

Beberapa sekolah yang terlibat dalam Gerakan Jumat Menanam antara lain SDN Ciparay Rancabali, SMPN 2 Cimahi, dan SMAN 1 Saguling. Proses kolaborasi dimulai dengan koordinasi bersama Aparat Desa dan pihak sekolah, dengan memberikan surat permohonan kerja sama atau mengunjungi langsung yang diwakili oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK). Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab Gerakan Jumat Menanam di lapangan, yang mengatakan:

"Sebelumnya kami melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, Kepala Pimpinan SD sekolah, baik secara formal dengan surat maupun secara langsung. Demonstrasi kami lakukan dengan berkunjung langsung ke lapangan." (Wawancara dengan Diman Firmansyah, 2023).

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) melakukan survei terlebih dahulu untuk meninjau lokasi Gerakan Jumat Menanam. Adapun CSR manual building yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah setelah melakukan survei ke lokasi penanaman, kemudian dibuat surat permohonan kerja sama kepada Aparat Desa.

Proses bottom-up dalam Gerakan Jumat Menanam ini terjadi ketika stakeholder meminta bibit kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penanaman. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Pembimbing SMAN 1 Saguling:

“Proses perencanaan kami lakukan sebagai mata pelajaran P5 atau proyek, di mana salah satu proyeknya adalah keunggulan, terutama di masyarakat Saguling, karena banyak tanaman yang ditebang tanpa ada penggantinya. Sehingga kami tergerak untuk menanam pohon di SMAN 1 Saguling.” (Wawancara dengan Lalan Suherlan, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak sekolah SMAN 1 Saguling selalu mengadakan proyek sekolah setiap tahunnya. Salah satu proyek tersebut adalah penanaman pohon. Penanaman ini dilakukan atas inisiatif pihak sekolah, karena melihat banyak pohon yang ditebang sehingga lingkungan terasa gersang. Oleh karena itu, pihak sekolah SMAN 1 Saguling berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan Gerakan Jumat Menanam. Selain itu, dalam perencanaan Gerakan Jumat Menanam ini terdapat proses top-down, di mana Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan survei ke lokasi Gerakan Jumat Menanam atau melalui Instagram @dishut_jabar. Melalui Instagram @dishut_jabar, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat merilis kontribusi bibit yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan Gerakan Jumat Menanam.

Pada tahap pelaksanaan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat membentuk sebuah Tim Gerakan Jumat Menanam yang memiliki tugas melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengumpulan dan penyediaan bibit pohon, penentuan lokasi/daerah/lahan kritis, serta waktu untuk penanaman pohon. Tim ini juga berkoordinasi dengan stakeholder untuk turut serta dalam pelaksanaan penanaman, melakukan pemantauan penanaman dan pemeliharaan pohon yang telah ditanam, serta pelaporan hasil kegiatan melalui aplikasi Si Mantri Bibit dan Si Mantap. Pelaporan hasil kegiatan dilakukan secara berkala dan tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, tim juga bertugas mengedukasi stakeholder mengenai Gerakan Jumat Menanam.

Jumlah anggota yang terlibat dalam Gerakan Jumat Menanam ini sebanyak 12 orang, di antaranya adalah Ketua Tim Gerakan Jumat Menanam, Sekretaris, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya (2 orang), Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda (2 orang), Analis SDMA – non JF (1 orang), Dokumentasi (1 orang), Pengelola Web (1 orang), Programmer (1 orang), Tenaga Pengemudi (1 orang), dan Tenaga Kebersihan (1 orang).

Selain itu, Divisi Hubungan Masyarakat juga ikut terlibat dalam implementasi Gerakan Jumat Menanam sesuai dengan tugasnya untuk mensosialisasikan program yang akan dan telah dilaksanakan. Secara fungsional, divisi ini memiliki tanggung jawab dalam

pelaksanaan Gerakan Jumat Menanam. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Konseptor Gerakan Jumat Menanam sebagai berikut.

“Jadi yang menggarap Si Mantap, Si Mantri Bibit, Si Manfaat itu kehumasan, humas Dishut, ya bukan humas semua. Jadi semua kebijakan Pak Kadis itu yang menjadi corongnya adalah humas” (Wawancara dengan Nana Subarna, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa Divisi Hubungan Masyarakat merupakan ujung tombak dari program Gerakan Jumat Menanam ini. Divisi Hubungan Masyarakat di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK), yang merupakan bentuk sosialisasi dalam tahap implementasi. Humas pemerintah menjadi tumpuan dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah kepada masyarakatnya (Putra & Daga, n.d.). Selain itu, saat Gerakan Jumat Menanam dilaksanakan, Divisi Hubungan Masyarakat juga ditugaskan untuk melakukan dokumentasi sebagai bukti bahwa program Gerakan Jumat Menanam telah terlaksana. Selama implementasi, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat memberikan pengarahan kepada stakeholder.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan dengan monitoring melalui aplikasi Si Mantap, yang menandai bibit yang sudah ditanam dengan titik berwarna hijau, menunjukkan bahwa Gerakan Jumat Menanam telah dilaksanakan di lokasi tersebut. Pada bulan Oktober, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan Gerakan Jumat Menanam di SDN Ciparay Rancabali yang dilaksanakan di Stamplat Girang, Kabupaten Bandung.



Gambar 1. Pelaksanaan Jum'at Menanam bersama SD Ciparay Rancabali

Sumber: Instagram @dishut_jabar (2023)

Pelaksanaan Gerakan Jumat Menanam bersama SDN Ciparay Rancabali ini dihadiri oleh Kepala Kecamatan, Aparat Desa Stamplat Girang, guru-guru, dan siswa-siswi SDN Ciparay Rancabali. Gerakan Jumat Menanam dimulai dengan pembuatan yel-yel yang dipandu oleh Bapak Dodit Ardian, selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, siswa-siswi SDN Ciparay Rancabali diajarkan cara menanam pohon. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Pembimbing SDN Ciparay Rancabali.

“Jadi, bersama penduduk setempat, Pak Kadus sudah menyiapkan lubang-lubang untuk menanam, dan bibit-bibitnya itu dibawa dari perhutanan. Jadi, tinggal ditanam-tanam, diajari juga cara menanam seperti disimpan, malah sempat membuat yel-yel” (Wawancara dengan Sartika, 2023).



Gambar 2. Pelaksanaan Jum'at Menanam bersama SMPN 2 Cimahi

Sumber: Instagram @dishut_jabar (2023)

Adapun pelaksanaan Gerakan Jumat Menanam dengan SMPN 2 Cimahi dilaksanakan di Desa Cileuya, Kuningan, Jawa Barat, yang diikuti oleh Aparat Desa, guru-guru, dan siswa-siswi SMPN 2 Cimahi sebanyak 25 orang. Selain itu, warga setempat pun ikut terlibat dalam pelaksanaan Gerakan Jumat Menanam. Sebelum melakukan penanaman, siswa-siswi SMPN 2 Cimahi diminta untuk membawa bibit ke lokasi penanaman beriringan dengan Anggota Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Gerakan Jumat Menanam bersama SMPN 2 Cimahi ini diawali dengan upacara pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Dodit, selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan dengan penanaman pohon.



Gambar 3. Pelaksanaan Jum'at Menanam bersama SMPN 2 Cimahi
Sumber: Instagram @dishut_jabar (2023)

Implementasi Gerakan Jumat Menanam dengan SMAN 1 Saguling dimulai dengan penanaman bibit oleh siswa yang dibantu oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Pihak Desa. Setelah itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengajarkan nama-nama ilmiah bibit yang akan ditanam dengan tujuan agar siswa-siswi SMAN 1 Saguling menjadi lebih paham. Dengan demikian, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian mau, dan mampu melaksanakan Gerakan Jumat Menanam.

Pada tahap evaluasi, saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat belum melakukan evaluasi terkait program Gerakan Jumat Menanam karena masih menunggu hingga bibit-bibit yang sudah ditanam tumbuh agar hasilnya dapat terlihat. Namun, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sudah menjadwalkan pelaksanaan evaluasi program Gerakan Jumat Menanam ini, yang nantinya akan dihadiri oleh pihak internal Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Berikut yang disampaikan oleh Bapak Nana Subarna selaku Konseptor program Gerakan Jumat Menanam.

“Penyelenggaraan evaluasinya mungkin nanti kita akan lakukan pada saat penanaman termin 1, sampai mungkin kondisi tanaman itu T+3. Ada tahapan-tahapan, ada triwulan, ada tahunan. Pada akhir tahun kita coba evaluasi, tetapi ini masih tahun berjalan, jadi kalau evaluasi belum terlaksana, namun monitoring dan pemantauan masih berjalan.” (Wawancara dengan Nana Subarna, 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, meskipun evaluasi Gerakan Jumat Menanam ini belum diadakan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat masih melakukan monitoring hingga saat ini. Sehingga sejauh ini sudah terlihat berapa jumlah bibit yang sudah ditanam oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam program Gerakan Jumat Menanam melalui website Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yaitu Si Mantap.

Dalam tahap pelaporan, pelaporan dilakukan oleh Pengendalian Daerah Aliran Sungai (PEDAS) secara manual, kemudian dilaporkan kepada Divisi Hubungan Masyarakat untuk dimasukkan ke dalam website. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki dua website yang digunakan, yaitu Si Mantri Bibit dan Si Mantap. Berikut yang disampaikan oleh Bapak Nana Subarna selaku Konseptor program Gerakan Jumat Menanam.

“Mekanisme pelaporan itu, pelaporan dari bidang PEDAS dilakukan secara manual. Jadi, ada Simantri dan Simantap untuk pengembangan dua itu nanti ada Simanfaat. Kalau Simantri itu kontribusinya saja, titik-titiknya. Kalau Simantap itu sudah ke arah tadi, kondisi pemantauan dan evaluasi” (Wawancara dengan Nana Subarna, 2023).

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melaporkan kontribusi bibit yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melalui Si Mantri Bibit. Dalam website tersebut, dapat terlihat jumlah bibit yang sudah disalurkan. Sebelumnya, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menargetkan kontribusi bibit sebanyak 70.000.000 bibit dalam waktu 2 tahun. Namun, belum genap setahun, kontribusi bibit ini sudah mencapai lebih dari yang ditargetkan. Terhitung sejak tanggal 5 Juli 2023, jumlah kontribusi bibit di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebanyak 79.544.928 bibit pohon.

Selain melaporkan melalui website, Divisi Hubungan Masyarakat juga melaporkan program Gerakan Jumat Menanam bersama SDN Ciparay Rancabali, SMPN 2 Cimahi, dan SMAN 1 Saguling melalui Instagram @dishut_jabar. Hal ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk membangun sistem informasi. Selain itu, pelaporan melalui Instagram ini merupakan bentuk kampanye untuk mensosialisasikan program Gerakan Jumat Menanam kepada masyarakat. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat berharap program ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat berkontribusi dalam implementasinya. Setelah terlaksananya program Gerakan Jumat Menanam bersama SDN Ciparay Rancabali, Divisi Hubungan Masyarakat mengunggah sebuah postingan di Instagram @dishut_jabar. Dalam postingan tersebut, terdapat sebuah video yang menceritakan secara singkat tentang Gerakan Jumat Menanam bersama SDN Ciparay Rancabali.



Gambar 4. Update Kegiatan di Media Sosial Instagram

Sumber: Instagram @dishut_jabar (2023)

Berdasarkan pemaparan di atas, pelaporan Gerakan Jumat Menanam ini rutin dilakukan oleh Divisi Hubungan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melalui website Si Mantri Bibit dan Si Mantap. Selain itu, Divisi Hubungan Masyarakat juga melaporkan kegiatan Gerakan Jumat Menanam di Instagram @dishut_jabar. Adapun

manfaat dari Gerakan Jumat Menanam ini adalah bahwa siswa-siswi SDN Ciparay Rancabali, SMPN 2 Cimahi, dan SMAN 1 Saguling menjadi termotivasi untuk melakukan penanaman pohon. Hal ini tentunya bermanfaat bagi generasi muda di masa depan agar dapat menjaga dan merawat lingkungan secara lebih baik.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh sebuah organisasi terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan kegiatan organisasi tersebut, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk perilaku yang transparan dan etis, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, yang meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan aliran sungai.

Menurut Wibisono, langkah utama yang harus dilakukan dalam perencanaan CSR adalah Awareness Building, yang bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial bagi organisasi atau perusahaan (Halimah Mufrodatul, 2016: 20).

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menerapkan konsep Awareness Building ini melalui Gerakan Jumat Menanam, yang bertujuan untuk memulihkan dan memelihara kondisi lingkungan serta meningkatkan kelestarian alam di kabupaten/kota se-Jawa Barat. Gerakan ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 522.4/17/rek tentang Pelaksanaan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon.

Menurut Elkington, instansi atau perusahaan harus menjaga lingkungan, khususnya yang ada di sekitar operasional mereka, karena sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan (Rahmatika et al., 2020). Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Jumat Menanam ini selaras dengan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan kemantapan kawasan hutan, menjaga keberlangsungan fungsi kawasan lindung, mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik dan aparatur.

Langkah kedua dalam perencanaan CSR menurut Wibisono adalah CSR Assessment (Halimah Mufrodatul, 2016: 20). CSR Assessment adalah upaya untuk memetakan kondisi organisasi atau perusahaan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat prioritas perhatian. Berdasarkan hasil observasi pada tahun 2019, total lahan kritis di Provinsi Jawa Barat mencapai 907.683,67 hektare. Pada tahun 2021, lahan kritis yang telah direhabilitasi atau ditanami pohon seluas 354.427,62 hektare, namun masih banyak lahan kritis yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Dengan adanya peta kondisi lahan kritis yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, mereka dapat memprioritaskan lokasi-lokasi yang membutuhkan penanaman pohon dalam pelaksanaan Gerakan Jumat Menanam.

Langkah ketiga dalam perencanaan menurut Wibisono adalah melakukan CSR Manual Building. CSR Manual Building adalah tahapan di mana setelah kebutuhan-kebutuhan diketahui, dibuatlah pedoman implementasi tanggung jawab sosial di sebuah perusahaan (Halimah Mufrodatul, 2016: 20). Peneliti melihat bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan survei mengenai lahan-lahan kritis di Provinsi Jawa Barat dan membuat surat terkait permohonan kerja sama kepada Aparat Desa. Adapun saat mendatangi lokasi lahan kritis, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat meninjau kondisi lapangan dan mendiskusikan bibit tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk direalisasikan saat Gerakan Jumat Menanam.

Menurut Wibisono, dalam perencanaan terdapat tiga model pelaksanaan: 1) Bottom Up Process, program berdasarkan permintaan stakeholder; 2) Top Down Process, program berdasarkan survei instansi atau perusahaan; 3) Partisipatif, program yang dirancang bersama antara instansi dan stakeholder (Halimah Mufrodatul, 2016: 20).

Dari segi perencanaan, peneliti melihat bahwa dalam program Gerakan Jumat Menanam, bottom up process diterapkan ketika stakeholder memberikan surat terkait permohonan bibit untuk penanaman. Setelah surat tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Aziz Jakaria selaku Analis SDMA akan menghubungi pihak yang bersangkutan untuk membawa bibit tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 751, Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini selaras dengan yang dilakukan pada saat penanaman bersama SMAN 1 Saguling, di mana saat itu sekolah memiliki program yang sama dengan Gerakan Jumat Menanam. Perencanaan dilakukan oleh pihak sekolah dan aparat desa, namun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tetap berkontribusi dengan memberikan bibit dan mengikuti implementasi.

Adapun dalam top down process, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat memberikan surat terkait permohonan kerja sama implementasi Gerakan Jumat Menanam kepada pihak-pihak yang akan dilibatkan, seperti SDN Ciparay Rancabali, SMPN 2 Cimahi, dan SMAN 1 Saguling. Setelah surat tersebut diterima oleh aparat desa, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan survei ke lokasi lahan kritis untuk mengetahui kondisi tempat pelaksanaan Gerakan Jumat Menanam.

Setelah itu, peneliti melihat bahwa partisipatif dilakukan dengan merencanakan implementasi Gerakan Jumat Menanam, di mana Cabang Dinas Kehutanan (CDK) berdiskusi dengan aparat desa terkait bibit yang dibutuhkan di lokasi penanaman, serta mendiskusikan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam implementasi Gerakan Jumat Menanam. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nana, peneliti melihat bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tidak membatasi jumlah orang yang ingin berpartisipasi dalam Gerakan Jumat Menanam. Namun, karena keterbatasan lokasi, perlu didiskusikan jumlah orang yang akan ikut dalam implementasi. Seperti saat Gerakan Jumat Menanam bersama SMPN 2 Cimahi, di mana pihak sekolah menginstruksikan siswa-siswi yang ikut sebanyak 4 kelas, tetapi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat hanya memperbolehkan 25 orang saja karena lokasi penanaman tidak dapat menampung banyak orang. Selain itu, pihak sekolah juga merencanakan upacara pembukaan atau opening ceremony, serta

menyiapkan yel-yel untuk menyambut kedatangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pada saat perencanaan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat juga mendiskusikan aspek keberlanjutan (sustainability).

Menurut David, sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi di masa depan (Ginting & Hasanah, 2015: 932).

Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa saat melakukan perencanaan mengenai Gerakan Jumat Menanam, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat juga merencanakan keberlanjutan setelah dilaksanakannya Gerakan Jumat Menanam. Keberlanjutan tersebut dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan melakukan pemberdayaan untuk merawat bibit pohon yang sudah ditanam, sehingga pohon yang ditanam akan tumbuh dan menghasilkan buah. Kemudian, buah tersebut dapat digunakan oleh masyarakat Provinsi Jawa Barat. Menurut Elkington, instansi tidak boleh hanya mengutamakan keuntungan bagi organisasi saja, tetapi harus dapat memberikan kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya (Kasmawati, 2014: 18-19). Berkaitan dengan hal itu, peneliti menyimpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan dalam Gerakan Jumat Menanam adalah hasil panen yang sepenuhnya diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat kepada stakeholder, sehingga buah yang dihasilkan dapat digunakan atau dijual oleh masyarakat sekitar. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keuntungan yang diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melalui Gerakan Jumat Menanam dapat merealisasikan visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yaitu "Hutan Lestari Bagi Kesejahteraan Masyarakat."

Pada tahap implementasi, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu pengorganisasian (organizing) sumber daya, penyusunan (staffing), pengarahan (direction), pengawasan atau koreksi (controlling), pelaksanaan sesuai rencana, dan penilaian (evaluation) tingkat pencapaian tujuan (Wibisono dalam Halimah Mufrodatul, 2016: 20).

Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat membentuk sebuah tim (organizing) bernama Tim Gerakan Jumat Menanam yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengumpulan dan penyediaan bibit pohon, penentuan lokasi/daerah/lahan kritis dan waktu untuk penanaman pohon, berkoordinasi dengan stakeholder untuk turut serta dalam implementasi penanaman, pemantauan penanaman, pemeliharaan pohon yang telah ditanam, serta pelaporannya melalui aplikasi Si Mantri Bibit dan Si Mantap. Tim juga melakukan pelaporan hasil kegiatan secara berkala dan tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, serta mengedukasi stakeholder mengenai Gerakan Jumat Menanam.

Adapun jumlah anggota yang terlibat dalam Gerakan Jumat Menanam ini sebanyak 12 orang, di antaranya Bapak Nana Subarna, S.P. (Ketua Tim Gerakan Jumat Menanam), Bapak Iip Suryadi, S.ST. (Sekretaris), Acad Sudrajat, S.Hut., M.P. (Pengendali Ekosistem

Hutan Ahli Madya), Finauly Hadiyanti, S.Si., M.P. (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya), Iyon Sugiono, S.Hut. (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda), Asep Romansyah, S.Hut. (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda), Aziz Jakaria, S.Tr.IP. (Analisis SDMA – non JF), Rezza Finaldi Wahyudin (Dokumentasi), Ajeng Ambar Retno (Pengelola Web), Reihan Fazri Aldiansyah (Programmer), Suryanto (Tenaga Pengemudi), dan Muhsinun (Tenaga Kebersihan), yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan memonitoring Gerakan Jumat Menanam. Selain itu, Divisi Hubungan Masyarakat juga terlibat dalam implementasi Gerakan Jumat Menanam. Pada saat implementasi, Divisi Hubungan Masyarakat ditugaskan untuk mendokumentasikan Gerakan Jumat Menanam.

Saat implementasi Gerakan Jumat Menanam, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Bapak Dodit Ardiana Pancapana selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yang memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Gerakan Jumat Menanam dengan mengedukasi mengenai penanaman dan pentingnya menjaga lingkungan. Tidak hanya itu, setelah implementasi Gerakan Jumat Menanam, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) melakukan pengawasan terkait bibit yang telah ditanam dan dilaporkan di website Si Mantri Bibit dan Si Mantap. Hingga saat ini, Gerakan Jumat Menanam ini dinilai telah sesuai dengan rencana, karena pencapaian jumlah kontribusi bibit telah melebihi target yang ditetapkan. Namun, Gerakan Jumat Menanam ini masih dalam tahap kampanye, sehingga masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Barat, masih perlu diberikan himbauan terkait implementasi Gerakan Jumat Menanam.

Menurut Elkington, instansi atau perusahaan harus bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial seluruh stakeholder-nya (Kasmawati, 2014: 18-19). Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Gerakan Jumat Menanam ini antara lain Sekolah-sekolah di Jawa Barat, Aparat Desa, Polsek, hingga influencer. Adapun indikator keberhasilan dari Gerakan Jumat Menanam ini adalah apabila seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat telah ikut serta dalam implementasi Gerakan Jumat Menanam. Dengan dilibatkannya pihak-pihak tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat berharap dapat mengedukasi masyarakat, sehingga mereka dapat membantu menangani lahan-lahan kritis.

Menurut Wibisono, tahap implementasi terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, implementasi, dan internalisasi (Halimah Mufrodatul, 2016: 20). Dari segi implementasi, peneliti mengamati bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Divisi Hubungan Masyarakat, melakukan sosialisasi melalui Instagram @dishut_jabar dengan menginformasikan kontribusi bibit yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Adapun saat implementasi Gerakan Jumat Menanam bersama SDN Ciparay Rancabali, SMPN 2 Cimahi, dan SMAN 1 Saguling, acara diawali dengan opening ceremony atau upacara pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Setelah itu, kegiatan penanaman bibit pohon dipandu oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK). Kemudian, siswa-siswi diajarkan mengenai nama-nama latin bibit pohon yang ditanam. Tahap internalisasi dalam Gerakan Jumat Menanam dilakukan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK).

Terkait dengan hal tersebut, respon dari pihak pendidik terhadap program Gerakan Jumat Menanam ini sudah baik. Bahkan, beberapa pihak pendidik berharap Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tetap menjalin komunikasi dengan sekolah agar dapat melaksanakan program Gerakan Jumat Menanam kembali. Menurut Ruslan, citra itu tidak bisa diukur secara matematis, tetapi wujudnya dapat dirasakan melalui penerimaan dan tanggapan (baik dan buruk) yang datang dari khalayak sasaran dan masyarakat luas pada umumnya (Rahmayanti, 2014: 98). Melihat respon dari pihak pendidik, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah berhasil membentuk citra positif di masyarakat melalui program Gerakan Jumat Menanam.

Menurut Wibisono, tahap evaluasi dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi dapat berguna untuk mengetahui kegagalan dan keberhasilan suatu program dan juga dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan, seperti keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, atau memperbaiki serta mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang diimplementasikan (Halimah Mufrodatul, 2016: 20).

Dalam tahap evaluasi, peneliti menyimpulkan bahwa saat implementasi Gerakan Jumat Menanam bersama SDN Ciparay Rancabali, SMPN 2 Cimahi, dan SMAN 1 Saguling, tidak ada kendala yang signifikan, sehingga dapat dikatakan berhasil sesuai dengan perencanaan. Proses evaluasi ini dilakukan oleh internal Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun, setelah bibit yang ditanam telah terlihat perkembangannya. Sejauh ini, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tidak ada rencana untuk mengadakan kembali Gerakan Jumat Menanam bersama SDN Ciparay Rancabali, SMPN 2 Cimahi, dan SMAN 1 Saguling, karena Gerakan Jumat Menanam ini akan dilaksanakan secara merata di seluruh Provinsi Jawa Barat.

Simpulan

Perencanaan pada Gerakan Jumat Menanam ini menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan GTTP di Lahan Kritis Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, melakukan rapat internal untuk meninjau lahan kritis di Provinsi Jawa Barat yang perlu menjadi prioritas utama, serta melakukan survei untuk menentukan bibit yang dibutuhkan di lapangan. Pada tahap pelaksanaan, dibentuk sebuah tim yang terdiri dari 12 orang yang memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan memonitoring. Tahap evaluasi pada Gerakan Jumat Menanam meliputi rapat internal Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terkait pembahasan kegiatan yang telah dilakukan, serta evaluasi pada akhir tahun untuk melihat perkembangan pohon. Tahap pelaporan dilakukan melalui website Si Mantri Bibit dan Si Mantap.

Latar belakang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Gerakan Jumat Menanam secara rutin merupakan bentuk tanggung jawab dalam menghadapi lahan kritis. Mengingat bahwa saat ini kondisi lahan kritis di Provinsi Jawa Barat mencapai 907.683,67 hektare, maka penanganan lahan kritis yang konsisten sangat diperlukan. Adapun indikator keberhasilan dalam Gerakan Jumat Menanam ini adalah

jika masyarakat dapat terlibat, sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melibatkan seluruh pihak dalam pelaksanaannya, salah satunya pihak sekolah-sekolah se-Jawa Barat.

Penelitian ini hanya fokus pada implementasi program Green Movement yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan survei atau metode kuantitatif untuk mengukur perubahan dalam sikap target sasaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

Referensi

- Ginting, F., & Hasanah, R. (N.D.). *Strategi Public Relations Dalam Mengkomunikasikan Kegiatan Corporate Social Responsibility PT Kereta Api Indonesia Di Bidang Kesenian (Studi Kasus Marching Band Locomotive Bandung) Public Relations Strategy To Communicate Corporate Social Responsibility Of PT Kereta Api Indonesia In The Field Of Art (Case Study Of Marching Band Locomotive Bandung)*.
- Halimah Mufrodatul. (2016). *Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) Pada PT.Otsuka Indonesia-Malang*. Universitas Brawijaya.
- Hamid, F. Z. A., Atan, R., & Saleh, M. S. M. (2014). A Case Study Of Corporate Social Responsibility By Malaysian Government Link Company. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 164, 600–605. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.152>
- Kapitan, P., Amah, M. ', & Mandaru, S. S. E. (N.D.). *Analisis Pembentukan Citra PT Pln (Persero) Wilayah NTT Melalui Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Cooperate Image Analysis On The Implementation Of Community Development And Partnership Programs By PLN NTT*.
- Kubba, S. (N.D.). *Introduction-The Green Movement Yesterday And Today*. Retrieved March 31, 2023, From <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803830-7.00020-7>
- Nugharani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Pamungkas, H. S. R., & Karmadi, M. A. (2015). *Analisis Lahan Kritis Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat*. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jurnalteknik/article/view/356/1984>
- Pertiwi, P. P. B. (2021). *Little Bandung Sebagai Strategi Dalam Memasarkan Produk Umkm Kota Bandung Di Pasar Internasional [Universitas Muhammadiyah Malang]*. <https://eprints.umm.ac.id/77076/>
- Putra, Y. K., & Daga, L. L. (N.D.). *Strategi Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Ngada Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah*.
- Rahmatika, N. W., Winarno, J., & Ihsaniyati, H. (2020). *Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis*. 4(1), 314.
- Rahmayanti, D. R. (N.D.). *Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Membangun Reputasi Perusahaan*.
- Retno, A. A. (2021). *Kampanye Public Relations Gerakan Tanam Pelihara 50 Juta Pohon Dalam Membentuk Citra Positif (Studi Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Kampanye Public Relations Gerakan Tanam Pelihara 50 Juta Pohon Dalam Membentuk Citra Positif Di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Sangga Buana.
- Sattayapanich, T., Janmaimool, P., & Chontanawat, J. (2022). Factors Affecting Community Participation In Environmental Corporate Social Responsibility Projects: Evidence From Mangrove Forest Management Project. *Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/joitmc8040209>
- Si Mantri Bibit. (2020, February 17). *Gerakan Tanam Dan Pelihara Pohon Di Lahan Kritis Kabupaten/ Kota Se- Jawa Barat*. <https://simantribibit.jabarprov.go.id/>
-

- Sirait, D. A., Widiatmaka, W., & Rusdiana, O. (2021). Arahan Pengembangan Hutan Rakyat Untuk Penanganan Lahan Kritis Di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. *TATALOKA*, 23(3), 344–353. <https://doi.org/10.14710/Tataloka.23.3.344-353>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuningrum, N., & Basuki, T. (2019). Analisis Kekritisn Lahan Untuk Perencanaan Rehabilitasi Lahan DAS Solo Bagian Hulu (Analyses Of Degraded Land For Rehabilitation Planning In Upper Solo Watershed). *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, 3(1), 27–44. <https://doi.org/10.20886/Jppdas.2019.3.1.27-44>